

## Agar Hutan Senantiasa Lestari

Kementerian Kehutanan telah mencanangkan Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan. Lantas bagaimana evaluasi tahun ini dan rencana tahun depan?

"Pada 2012, kami menetapkan tata batas hutan sepanjang 16 ribu kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi. Pada tahun 2011 hanya sepanjang 4.299 kilometer," kata Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan, kepada *Jurnal Nasional*, akhir Desember, di Jakarta.

Seluruh KPH di setiap provinsi pun ditetapkan. Pada 2012, KPH yang beroperasi menjadi 60 unit. Pada 2011 hanya 17 unit, dari total penetapan 45 unit. Kualitas data dan informasi potensi sumber daya hutan yaitu enumerasi dan re-emumerasi TSP/PSP juga ditingkatkan yaitu 599 plot. Ditetapkan pula penambahan atau pencadangan area tanaman pada hutan tanaman industri/hutan tanaman rakyat (HTI/HTR) 500 ribu hektare. Penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan restorasi ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada area bekas tebangan (*logged over area/LOA*) ditetapkan 450 ribu hektare.

Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan hutan lindung pun menurun sebanyak 3% (kumulatif). Meningkatkan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 1,5% dari kondisi tahun 2008, sesuai kondisi biologis dan ketersediaan habitat. Adapun jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun (kumulatif) 48,8% dari rerata tahun 2005-2009. Rehabilitasi hutan seluas 500 ribu hektare.

Rencana lainnya dalam memfasilitasi pengelolaan dan penetapan area kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 400 ribu hektare. Fasilitas pengelolaan dan penetapan area kerja Hutan Desa (HD) seluas 100 ribu hektare. Fasilitas pembangunan Hutan Rakyat Kemitraan seluas 50 ribu hektare. Lalu, rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 36 unit DAS prioritas. Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam, dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari.

Pada 2012, Kementerian Kehutanan mematok penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,75 triliun. Pada 2011 PNBP penggunaan kawasan hutan pada Ditjen Planologi tahun 2011 sebesar Rp315.672.169.228 dari target sebesar Rp175 miliar.

Perihal penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan ditargetkan minimal menang (kumulatif) 48%. Sedangkan pagu anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012, Kementerian ini memperoleh anggaran Rp6.095.263.162.000. Tahun depan, program menanam 1 miliar pohon setiap tahun kembali dilanjutkan. Pada 2011, penunjukan kawasan hutan berada di 29 provinsi. Pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei, penyelidikan umum dan eksploitasi seluas 1.456.462 hektare (313 unit).

Kebijakan Presiden terbaru terkait konservasi dan diversifikasi energi primer untuk peningkatan tambahan daya listrik 10.000 MW hingga 2015, Kementerian ini menyediakan kerja sama geotermal sebanyak 28 unit sampai 2014 di Sumatera, NTB, NTT, Sulawesi, dan Maluku. Sampai tahun 2011 telah dilakukan kerja sama geotermal 21 unit. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia mencapai 28 ribu MW, atau hampir 40% potensi panas bumi dunia. Namun baru sekitar 1.332 MW (4%) yang baru dimanfaatkan dari potensi yang ada, di bawah Filipina (2.000 MW) dan Amerika (2.700 MW).

Energi hijau (ramah lingkungan) dikembangkan melalui pola energi *biofuel* potensial dari Nyamplung atau *Callophyllum inophyllum* (Tahun 2009 dikembangkan Desa Mandiri Energi berbasis Nyamplung di Kabupaten Purworejo dan Banyuwangi) dan Kemiri Sunan atau *Aleurites trisperma* (pengembangan dipusatkan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus-KHDTK Rarung, Lombok Tengah dengan menanam sebanyak 13.500 bibit). Adapun untuk energi biomassa, disediakan lahan 200 ribu hektare untuk area HTI terkait biomassa. Untuk energi sekaligus pangan dikembangkan sagu dan pohon aren, di mana bioetanol menjadi sumber energi terbarukan.

Menilik rehabilitasi hutan dan lahan, kalau pada 2010, melalui gerakan penanaman dan pemeliharaan 1 miliar pohon, telah tertanam 1,3 miliar pohon. Maka pada 2011, realisasi penanamam dan pemeliharaan 1 miliar pohon telah mencapai 827 juta batang (80%) atau setara dengan 4.900.000 ton CO<sub>2</sub>. Puncak HMPI dan BMI tahun 2011, tanggal 28 November 2011, bertempat di Bukit Merah Putih, *Indonesia Peace dan Security Centre*, Sentul, Citeureup, Bogor, Jawa Barat. SBY menanam Manglid (*Manglietia glauca*).

Untuk rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.500 hektare dari rencana 100 ribu hektare, rehabilitasi lahan kritis pada DAS Prioritas melalui penanaman bibit KBR seluas 805.707 hektare dari rencana 389 ribu hektare. Pembuatan atau rehabilitasi hutan kota seluas 1.395 hektare dari rencana 1.000 hektare. Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai seluas 10.621 hektare dari rencana 10.000 hektare.

Mengenai pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terjadi penurunan kasus tindak pidana kehutanan 57%. Tahun 2010 sebanyak 182 kasus dan tahun 2011 turun menjadi 78 kasus (63 kasus yang telah sampai pada proses yustisi P21). Telah dilakukan identifikasi penggunaan kawasan nonprosedural di enam provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Riau.

Penanganan perambahan di kawasan konservasi, dilaksanakan secara represif yustisial (represif yang diikuti proses hukum) contohnya kasus perambahan di Taman Nasional Gunung Leuser kurang lebih 1.400 KK, dan secara represif non-yustisial (tidak diikuti proses hukum) di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Telah dibentuk pula kelompok kerja penanganan perambahan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru, dan Hutan Lindung.

Pada 2011 Kementerian Kehutanan wajib menekan jumlah *hotspot* hingga 31 Desember 2011 37.690 titik. Realisasi hingga November 2011 sejumlah 28.136 *hotspot* sehingga untuk sementara terjadi penurunan 52,22%. Terjadi penurunan jumlah *hotspot* sebesar 49%. (rerata *hotspot* tahun 2005-2009 sebesar 58.096 titik, tahun 2011 jumlah *hotspot* 28.249). Nilai ini melebihi target yang telah ditentukan 36%. Taksiran luas kebakaran hutan juga menurun pada 2009 seluas 7.619,41 hektare, pada 2010 seluas 3.500,12 hektare, dan pada 2011 seluas 1.750,06 hektare.

Untuk pengembangan usaha jasa lingkungan dan wisata alam, sampai 2011 terdapat 25 buah Izin Pengusahaan Pariwisata (IPPA) yang mencakup sembilan lokasi Taman Nasional dan 16 lokasi non-Taman Nasional. Sedangkan untuk permohonan IPPA terdapat sembilan pemohon untuk Taman Nasional dan enam pemohon untuk non-Taman Nasional. *Road map* pembangunan nasional tahun 2010-2030 telah menetapkan enam koridor ekonomi, khusus untuk pariwisata telah ditetapkan Jawa dan Nusa Tenggara menjadi prioritas karena keunikan alam dan pangsa pasar yang berlimpah. Dari 6 juta wisatawan - 60% mempunyai destinasi di Jawa dan Nusa Tenggara. Keindahan dan Keunikan alam pada umumnya berada di Taman Nasional dan atau kawasan hutan.

Dunia internasional pun memberikan sejumlah pengakuan. Sebanyak enam TN sebagai *World Heritage Site* yaitu TN Komodo, TN Ujung Kulon, TN Lorentz, TN Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan; 6 TN sebagai Biosfer Reserve, yaitu TN Gunung Gede Pangrango, TN Lore Lindu, TN Wasur, TN Tanjung Puting, TN Siberut, dan TN Komodo; 2 TN sebagai Ramsar Site, yaitu TN Berbak dan TN Danau Sentarum; dan 1 CA sebagai *World Heritage Site*, yaitu TN Krakatau. **Dion B Arinto**